

SKRIPSI
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP APARAT KEPOLISIAN
YANG MELAKUKAN PELANGGARAN PADA KEPOLISIAN DAERAH
SUMATERA BARAT

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum Universitas Andalas*

Oleh :

AQIL ABYAN
2110113004

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (PK VII)



Pembimbing:

Dr. Khairani, SH., MH.
Titin Fatimah, SH., MH.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2025

No.Reg : 26/PK-VII/IV/2025

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP APARAT KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN PELANGGARAN PADA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT

*(Aqil Abyan, 2110113004, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 67 Halaman,
tahun 2025)*

ABSTRAK

Kepolisian merupakan penegak hukum (*Law Enforcer*) yang paling sering berinteraksi dengan masyarakat hal ini dikarenakan fungsi kepolisian sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, berdasarkan fungsi tersebut maka kepolisian dituntut menjadi institusi yang mematuhi peraturan disiplin dan bersih dari hal-hal yang bersifat indisipliner, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin terhadap aparat kepolisian yang melakukan pelanggaran pada Kepolisian Daerah Sumatera Barat serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, dimana data yang dikumpulkan berasal dari hasil wawancara dan analisis tentang penerapan hukuman disiplin Polri. Pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin merupakan bagian dari penyelesaian pelanggaran disiplin Polri, dalam proses penerapan penjatuhan hukuman disiplin polri seringkali belum dilakukan secara efektif, Kepolisian Republik Indonesia masih menghadapi berbagai kekurangan dalam penegakkan disiplin mulai dari kurangnya kesadaran disiplin, Penyimpangan dalam penjatuhan hukuman, Potensi penyalahgunaan wewenang. Hasil penelitian menunjukkan terjadinya kenaikan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri, dikarenakan berbagai faktor seperti pengulangan pelanggaran disiplin dan tidak adanya tingkatan dalam hukuman disiplin, hal ini sangat jelas menunjukkan adanya ketidakefektifan dalam penegakan disiplin, penelitian ini merekomendasikan adanya pembaruan dan perubahan terkait Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana dalam peraturan pemerintah ini tidak tercantum tingkatan dalam pelanggaran maupun hukuman disiplin Polri, dengan adanya tingkatan hukuman disiplin Polri maka hukuman disiplin yang dijatuhkan akan sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan, mengurangi kemungkinan pengulangan pelanggaran, serta meningkatkan kepatuhan anggota Polri akan peraturan disiplin.

Kata Kunci: Kepolisian Republik Indonesia, Hukuman Disiplin, Kepolisian Daerah Sumatera Barat